

**PEMBANGUNAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TERMASUK JAMBAN/ SANITASI KELURAGA OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KARIMUN DI KECAMATAN TEBING TAHUN
2012**

(ruvi_indayu@yahoo.com)

Oleh: **Ruvi Indayu** atas bimbingan **Drs. H.Ishak, M.Si**

ABSTRACT

The research on the development of uninhabitable housing rehabilitation, in this case in the Tebing District Karimun Regency to poor households is important to do, because the house is one of the basic human needs to be met, not only has the physical function, namely as a place of refuge but also has strategic value as the center of activities in which to implement its functions, especially the function of the children's education and coaching members of his family. Based on that, each family has always sought to have decent housing, even though objectively the whole family can not fulfill his desire. This was due to several factors, mainly economic factors family because of poverty and about the function of the house itself. This research aims to see about the implementation of the development activities uninhabitable housing rehabilitation including latrines/ sanitation family and factors that hinder the implementation of development activities uninhabitable housing rehabilitation including latrines/ sanitation family by Local Government Karimun Regency in Tebing District in 2012.

This research was conducted using a qualitative approach. Techniques used in data collection are interviews, documentation and observation. The primary data source is obtained from the beneficiaries, social services officials, DPRD, the companion, districts officials, and village officials. Sources of secondary data obtained from the reports, official documents, archives and other data as well as a complement of the primary data.

The results of this research showed that the implementation of development activities uninhabitable housing rehabilitation can be said to run well. Because most beneficiaries have been able to feel the benefits and this activity has a positive impact on meeting the needs of the home, social and psychological conditions although in practice there is still a shortage. The factors that hinder the implementation is one of the building material supply delays, because the manager is less responsible for his work. By looking at the problems that occur are expected to Local Government must be responsive, coordinate with other Government agencies and to the future implementation of the rehabilitation RTLH still need to be optimized with regard to strengthening the executive team, and the amount of the disbursement of funds, management team, and synergy with the various sectors.

Keywords: *House, Development, Rehabilitation RTLH*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah (tempat tinggal) adalah salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi. Karena rumah merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama selain sandang dan pangan dimana tempat manusia dapat berlindung, mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Rumah tidak hanya memiliki fungsi fisik yaitu sebagai tempat berlindung tetapi juga memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut, setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah yang layak huni, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginannya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan.

Dalam merespon kondisi masyarakat tersebut yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bersama untuk lebih fokus dan lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dalam percepatan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yaitu melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni termasuk sanitasi keluarga. Namun kenyataan di lapangan kegiatan pembangunan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Tebing dalam pelaksanaannya terkesan lambat dan banyak masyarakat penerima bantuan yang mengeluh dan kecewa karena pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut tidak kunjung selesai, bahkan ada rumah yang belum siap atau masih setengah jadi namun sudah ditempati. Selain itu Ketidak tepatan sasaran penerima dana bantuan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak setelah dana tersebut dicairkan. Pengelola dana dilakukan oleh pihak lain diluar sasaran penerima. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH.

Berdasarkan uraian di atas telah terjadi secara konkrit di lapangan. Namun pemerintah dalam hal ini tidak ada tindakan secara tegas dan nyata guna untuk menanggapi keluhan dari masyarakat penerima bantuan dan juga untuk mencapai tujuan demi keberhasilan dari kegiatan ini.

1.2 Tinjauan Pustaka

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan intervensi Pemerintah yang bersifat mengikat untuk memecahkan masalah publik. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada (Budi Winarno, 2007:18).

Menurut Friedrich Carl mengemukakan yang dimaksud dengan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu (Irfan Islami, 1999: 17).

b. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan merupakan tahap kedua setelah adanya perencanaan atau kebijakan yang telah dibuat, sering juga disebut dengan tahap implementasi. Perlu diketahui bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diberlakukan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2007 : 143).

Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model kebijakan sebagai suatu patokan dalam menyusun suatu kebijakan. Adapun model yang dipakai adalah model Merille S. Grindle (1980). Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan di transformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi Kebijakan Mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. (siapa) pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap. (Wibawa, 1994:22)

c. Pengawasan

Suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya pengawasan. Dalam mewujudkan pemerintahan tersebut itu perlu adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Suatu instansi pemerintahan dituntut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan proses untuk mengawasi, membimbing atau membina unit kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.

Tujuan dari dilakukannya pengawasan ialah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi.

Apabila timbul penyimpangan-penyimpangan dapat diambil tindakan untuk dikoreksi sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.

Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan, maka harus dimengerti arah dan tujuan dari pengawasan itu sendiri. Menurut Soekarno tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui sesuatu berjalan dengan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar apabila dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan ataupun kegagalan kearah yang lebih baik. (Soekarno K, 1993 : 103)

d. Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan tidak dapat terlepas dari kajian utama terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan bagaimana manusia memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Upaya kesejahteraan sosial yang terorganisasi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping tetap mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan berlaku didalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Walter A. Friedlander (1961) menyatakan kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Medgley, kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika (1) berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, (2) ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan (3) ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan (Adi *dalam* Suradi,2012: 206).

1.3 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni termasuk jamban/ Sanitasi Keluarga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun di Kecamatan Tebing Tahun 2012 ?

2. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni termasuk jamban/ Sanitasi Keluarga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun di Kecamatan Tebing Tahun 2012?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk melihat tentang pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk jamban/ sanitasi keluarga dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni termasuk jamban/ sanitasi keluarga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun di Kecamatan Tebing tahun 2012.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009: 25).

2.1 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan kepada responden yang telah ditetapkan dengan sejumlah pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009: 130).

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menguraikan hasil-hasil penelitian berupa pengamatan langsung, wawancara maupun data lain yang kemudian di jabarkan sesuai dengan hasil penelitian dan yang terjadi di lapangan yang menggambarkan keadaan sebenarnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Termasuk Jamban/ Sanitasi Keluarga di Kecamatan Tebing

1. Variabel Isi Kebijakan

a. Kepentingan yang terpenuhi dengan adanya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing

Kepentingan yang terpenuhi dengan adanya kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni antara lain adalah kepentingan pemerintah dan permintaan masyarakat. Kepentingan pemerintah dalam hal ini yaitu ingin mengurangi angka kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin. Namun kebijakan tersebut masih terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Masyarakat kecamatan Tebing merasakan adanya kepentingan pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dimana pihak tersebut yang mengelola keuangan namun tidak dilaksanakan dengan baik sehingga membuat pelaksanaan kegiatan rehab rumah terhambat.

Sedangkan kepentingan masyarakat dari kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan merasakan kenyamanan bertempat tinggal. Sehingga dengan adanya kebijakan ini penduduk miskin tersebut mampu dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan yang lebih baik. Tetapi dengan adanya masalah yang terjadi tersebut membuat penerima bantuan kecewa karena pelaksanaan rehab rumah tidak berjalan dengan sempurna.

b. Jenis dan Manfaat yang diterima oleh Kelompok Sasaran

Kegiatan pembangunan rehabilitasi RTLH dimana tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera. Adanya program rehabilitasi RTLH di Kecamatan Tebing, penerima bantuan telah merasakan manfaat yang didapatkan namun hal itu belum maksimal karena masih ada bagian rumah beberapa penerima bantuan yang belum selesai dikerjakan. Namun mereka sedikit lebih tenang, nyaman dan tentram setelah rumahnya diperbaiki dengan mendapatkan rumah yang lebih layak dari sebelumnya sehingga mereka tidak terbebani lagi dengan atap yang bocor dan khawatir akan banjir.

c. Derajat Perubahan yang diinginkan setelah adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Derajat perubahan kondisi rumah penerima bantuan rehabilitasi RTLH di kecamatan tebing setelah mendapatkan bantuan sangatlah terlihat perbedaannya, dimana sebelumnya rumah penerima bantuan dengan keadaan yaitu dinding menggunakan papan, atap masih rumbia dan bahkan tidak ada MCK namun setelah adanya program rehabilitasi RTLH mereka dapat tinggal di rumah yang lebih baik dan layak huni. Pembangunan rehab rumah penerima bantuan sudah berjalan baik dan semua rumah sudah dibangun tegak, namun belum dapat

dikatakan berhasil 100% karena banyak bagian rumah yang belum dipasang. Barang-barang yang dibutuhkan tidak ada karena belum dikirim oleh pihak yang mengurus pembeliannya. Jadi walaupun derajat perubahan juga telah tercapai tetapi tidak semua kelompok penerima bantuan merasakannya.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Disini Bupati Karimun mengeluarkan peraturan yaitu Perbup No 21 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibantu oleh dinas sosial kabupaten karimun. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kabupaten Karimun, yaitu pendataan, sosialisasi, penggerakan partisipasi masyarakat, penetapan calon penerima manfaat, memfasilitasi pembentukan kelompok, pembentukan tim pelaksana teknis, memfasilitasi pembukaan rekening kelompok, persetujuan pencairan dana bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dan semua itu telah diatur didalam Peraturan Bupati.

e. Pelaksana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun No. 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karimun Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa lembaga pengelola kegiatan ini terdiri dari:

- a. Tim Survey dan Monitoring Rehabilitasi RTLH yaitu Dinas Sosial Kabupaten Karimun
- b. Kecamatan
- c. Kelurahan/ Desa
- d. Pendamping
- e. Kelompok penerima bantuan rehabilitasi RTLH

Tim survey dan monitoring rehabilitasi RTLH adalah suatu tim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Karimun. Sedangkan dalam melakukan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH dimana keanggotaannya terdiri dari 10 orang termasuk dari Dinas Sosial, 1 orang dari kecamatan yang dibantu oleh 1 orang pendamping kecamatan dan juga 1 kelompok kelurahan/ desa yang terdiri dari 3 orang. Setelah 3 minggu pencairan dana tim survey dan monitoring telah dapat melakukan pengawasan, dimana untuk 1 kelompok dapat dilakukan 3-4 kali pengawasan.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, tim pelaksana kegiatan Rehabilitasi RTLH juga melibatkan pihak Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terlibatnya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH adalah sebatas sosialisasi ke masyarakat dan mengumpulkan berkas permohonan dari masyarakat.

f. Sumber Daya yang dikerahkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan dan juga orang-orang yang melaksanakannya karena hal ini sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH di Kecamatan Tebing. Secara kualitas yaitu orang yang harus memiliki kompetensi yang berkaitan dengan rehab rumah, selain itu juga menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan dalam proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas yaitu agar terhindarnya hal-hal yang tidak diinginkan serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan kerja sama baik yang hanya menguntungkan sepihak atau beberapa pihak lainnya.

Secara kuantitas, instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan rehabilitasi RTLH harus memiliki pegawai yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga apabila kegiatan dijalankan maka tidak berdampak pada kerja dilapangan nantinya.

2. Variabel Lingkungan Implementasi

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Analisis mengenai kegiatan rehabilitasi RTLH berarti pula menilai kemampuan-kemampuan kekuasaan dari para aktor yang terlibat, kepentingan-kepentingan mereka dan strategi-strategi yang mereka tempuh untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Kegiatan rehabilitasi RTLH di kecamatan tebing merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat. Sehingga penerima bantuan diberikan kepercayaan penuh pada masing-masing kelompok untuk mengatur dan mengelola sendiri kegiatan tersebut. Sedangkan pihak dinas sosial atau kecamatan dan sebagainya, disini hanya memberikan arahan dan juga pengawasan. Tapi nyatanya masih ada saja campur tangan pemerintah khususnya dari pihak kecamatan diluar tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah di tentukan dalam juknislak. Hal ini yang membuat pelaksanaan pembangunan rehab rumah ini bermasalah karena masih kentalnya peran pihak-pihak tertentu yang ingin mendominasi kegiatan ini.

b. Karakteristik Lembaga Penguasa

Karakteristik lembaga penguasa tidak lepas dari yang namanya struktur birokrasi yaitu adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu program. Pelaksanaan program pembangunan rehabilitasi RTLH di kecamatan tebing ini melibatkan beberapa pihak yang terkait diantaranya adalah Dinas Sosial Kabupaten Karimun, pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa yang membantu sosialisasi, pendamping dan masyarakat yang memanfaatkan kegiatan, dimana koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang berjalan dengan baik. Diawal pelaksanaan kegiatan dimana mereka berkoordinasi dan berkerjasama dalam melakukan sosialisasi dengan lancar dan pengawasan turun ke lapangan secara intensif, namun hal tersebut tidak berlaku saat proses rehabilitasi RTLH sedang mengalami masalah. Pihak-pihak yang terkait tersebut

hanya sekedar memberi saran dan masukkan tanpa ada hasil yang konkrit, dan bahkan dapat dikatakan tim pelaksana tersebut cenderung lepas tangan.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran

Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran merupakan hal yang penting. Kepatuhan dan daya tanggap yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas atas bantuan yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan dari yang diharapkan masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan rehab rumah di Kecamatan Tebing secara keseluruhan penerima bantuan terlihat patuh dengan semua aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat ditunjukkan dari proses perlengkapan administrasi, dimana untuk mendapatkan bantuan rehab rumah masyarakat tersebut harus mempunyai KTP terlebih dahulu, kemudian yang terpenting mempunyai tanah sendiri yang dibuktikan dengan surat tanah selanjutnya diterbitkannya surat bantuan dari Bupati. Saat penerima bantuan tersebut yang tidak mempunyai surat kepemilikan tanah, sedangkan rumahnya memang layak untuk mendapatkan bantuan, atas arahan dari pihak kelurahan maka mereka langsung mengurusnya dan semua itu gratis tanpa dipungut biaya. Sedangkan daya tanggap penerima bantuan ditunjukkan dengan keaktifan mereka terhadap proses-proses sosialisasi RTLH dan kemandirian dalam membangun rehab rumahnya. Dengan masalah dimana bahan-bahan material banyak yang datang lambat dan serba kurang kemudian mereka berinisiatif untuk menggunakan barang-barang lama yang masih bisa digunakan, mengeluarkan uang sendiri untuk membeli dan bahkan ada yang sampai melakukan pinjaman.

3.2 Hambatan/ Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Termasuk Jamban/ Sanitasi Keluarga di Kecamatan Tebing

1. Kurangnya Dana Bantuan yang diberikan

Keberhasilan dalam kegiatan rehab rumah ditentukan oleh besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelesaian program kegiatan rehab rumah tersebut. Besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merehabilitasi rumah yang tidak layak huni adalah sebesar Rp. 20.000.000,- per unit rumah. Bantuan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah masih dirasakan kurang oleh sebagian penerima bantuan tersebut. Karena bentuk rumah yang telah ditentukan oleh pemerintah dianggap kecil oleh sebagian penerima bantuan yang mempunyai anggota keluarga lebih banyak, sehingga mereka harus menyesuaikannya dengan keadaan keluarga. Hal ini membuat mereka lebih kesulitan lagi untuk dapat menyelesaikan rumah mereka secara sempurna

2. Keterlambatan Persediaan Material Bangunan

Persediaan material bangunan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan hal yang sangat penting. Apabila material bangunan tidak ada maka pelaksanaan pembangunan rehab rumah juga tidak akan dapat berjalan. Untuk itu pendistribusiannya sangat harus diperhatikan agar pelaksanaan rehab rumah dapat berjalan dengan lancar. Apabila

pendistribusiannya terabaikan maka hal ini akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan rehab rumah yang mengakibatkan penyelesaian rumah tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan persediaan bahan bangunan yang terjadi di Kecamatan Tebing ini disebabkan karena sulitnya untuk mendapatkan material yang paling dominan berupa kayu yang ada di toko sedangkan untuk mendapatkan bahan-bahan bangunan harus didatangkan dari luar pulau yaitu pulau Sumatera.

3. Sulitnya Mencari Tukang atau Ahli di bidang bangunan

Kegiatan Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Tebing, sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun, penerima bantuan rumah membentuk kelompok yang terdiri dari 5- 10 kepala keluarga yang tinggalnya berdekatan. Tujuannya agar masing-masing anggota dapat saling membantu dan berbagi sumber daya. Dalam pembangunan rehabilitasi RTLH ini tidak adanya tukang yang disediakan oleh pemerintah karena hal ini merupakan kegiatan pemberdayaan terhadap fakir miskin, namun pelaksanaannya dilapangan mereka sangat mengandalkan adanya tukang. Sedangkan untuk mencari tukang dengan upah 2,5 juta sulit ditemukan, karena mereka menginginkan upah yang lebih tinggi.

4. Ketidaktepatan Waktu dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Karimun telah ditentukan lamanya waktu pengerjaannya yaitu 120 hari kerja atau sekitar 4 bulan lamanya. Pelaksanaan kegiatan tersebut terhitung sejak dicairkan dana dari rekening oleh kelompok penerima bantuan. Kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di Kecamatan Tebing yaitu banyak diantaranya membangun rumah dari awal artinya membongkar bangunan lama yang tidak layak untuk dihuni lagi. Selain itu waktu yang telah ditentukan tidak cukup disebabkan mereka tidak mengerjakan rumahnya setiap saat karena mereka juga memiliki pekerjaan yang utama untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi mereka hanya dapat melaksanakan kegiatan tersebut jika ada waktu kosong dan setelah pulang kerja. Faktor cuaca juga mempengaruhi jika cuaca hujan maka perbaikan rumah dihentikan hingga menunggu waktu yang memungkinkan sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi RTLH ini akan tepat waktu jika dibantu oleh tukang atau ahli bangunan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan rehabilitasi RTLH di Kecamatan Tebing maka dapat dikatakan bahwa kegiatan ini kurang berjalan lancar dan masih banyak kekurangannya. Disini kepentingan pemerintah kurang dapat diimplementasikan dengan baik karena masih ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan walaupun derajat perubahan juga telah tercapai namun tidak semua kelompok penerima bantuan merasakannya. Dalam hal pelaksanaan kegiatan RTLH sudah diupayakan secara optimal oleh penerima bantuan namun

dari proses pelaksanaan dengan adanya masalah yang timbul, pemerintah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya tindakan yang nyata, dalam hal ini bisa dikatakan kurangnya keseriusan dan kesigapan pemerintah untuk dapat mengatasinya demi keberhasilan kegiatan ini.

Temuan penelitian menyatakan bahwa hambatan kegiatan pembangunan Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Tebing, kegiatan ini tidak selesai tepat waktu pengerjaanya, bahkan sampai saat akhir penelitian ini belum juga selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana bantuan, selain itu juga adanya permainan oleh pihak-pihak tertentu. Keterlambatan persediaan bahan bangunan dan hambatan lainnya yaitu sulitnya mencari ahli bangunan (tukang) yang sesuai dengan upah bayaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Karimun.

4.2 Saran

Diharapkan kepada Tim Pelaksana kegiatan mulai dari pemerintah tingkat bawah sampai dengan tingkat atas dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan dengan rasa tanggungjawab dan jujur. Pemerintah Daerah harus cepat tanggap, berkoordinasi dengan Instansi Pemerintahan lainnya dan membuat regulasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni agar bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu diharapkan pencairan dana dan pelaksanaannya harus tepat pada sasaran agar kegiatan ini terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Ucapan Terimakasih

Terselenggaranya penelitian ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bantuan baik berupa moril maupun materiil.

1. Ucapan terima kasih kepada Bapak Hendri selaku Teknisi RTLH Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan Bapak Jamaluddin selaku anggota komisi A DPRD Kabupaten Karimun.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Rudy Rosevel selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing dan Bapak Sapri selaku Tim Koordinasi Kelurahan Tebing, Ibu Titin selaku Kasi PMD Kelurahan Harjosari, Bapak Hasan Setyawan selaku Tim Koordinasi Kelurahan Pongkar.
3. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Drs.H.Ishak, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan saran dan meluangkan waktu dalam penelitian ini

Daftar Pustaka

Buku

- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Lukman Offset & YPAPI.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Menembus Ortodoksi kajian Kebijakan Publik: Problema dan Kebijakan Perumahan di Perkotaan*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.